

**ANALISIS EVALUASI DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN
KREDIT USAHA RAKYAT BAGI USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : EMIR AKBAR PAISS
NPM : 1605180024
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : EMIR AKBAR PAISS
N P M : 1605180024
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS EVALUASI DAN PERKEMBANGAN
KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH DI INDONESIA
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

Dra.Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si

Penguji II

ERIYANTI NASUTION, S.E., M.Ec

Pembimbing

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : Emir Akbar Paiss
N.P.M : 1605180024
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Penelitian : Analisis Evaluasi dan Perkembangan Kredit Usaha Rakyat
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan,

2020

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI S.E, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi

Dr. PRAWIDYA HARIANI S.E, M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, S.E, MM, M,Si

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Rumusan Masalah	15
1.4 Batasan Masalah.....	15
1.5 Tujuan Penelitian.....	15
1.6 Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teoritis	17
2.1.1 Pengeluaran Pemerintah.....	17
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	17
2.1.2.1.1 Teori Makro.....	17
2.1.2.1.2 Teori Mikro	22
2.1.2.1.3 Teori Produksi	24
2.2 Regulasi.....	28
2.2.1 Peraturan Undang-Undang.....	28
2.2.2 Kredit Usaha Rakyat.....	29
2.2.3 Usaha Kecil dan Menengah.....	31
2.3 Penelitian Terdahulu.....	34
2.4 Tahapan Alur.....	38

2.4.1 Tahapan Alur Penelitian.....	38
2.5 Kerangka Konseptual.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.....	39
3.2 Definisi Operasional	39
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	41
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Objek Penelitian	41
3.7 Tahapan Penelitian	44
3.7.1 Metode Analisis Deskriptif	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif Perkembangan UMKM Era Industri 4.0.....	45
4.1.1 Startup Bisnis Indonesia Yang Bisa Menembus Unicorn Dunia.....	49
4.1.2 Star Up Di Indonesia dan Peran Dalam Membangun Indonesia.....	50
4.1.3 Perbedaan antara Startup dan UKM.....	50
4.1.4 Unicorn Startups.....	52
4.1.5 Contoh-contoh Startup Sukses di Indonesia.....	53
4.2 Deskriptif data.....	
4.2.1 Perkembangan UMKM di Indonesia.....	58
4.2.2 Perkembangan KUR di Indonesia.....	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	64
---------------------	----

5.2 Saran.....	65
Daftar Pustaka.....	66
Lampiran.....	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-undang No.20 2008 tentang UMKM	6
Tabel 1.2 Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Triliun Rupiah) Tahun 2011-2016	7
Tabel 1.3 Penyaluran KUR Berdasarkan Provinsi Tahun 2020.....	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Keadaan Keternagakerjaan Indonesia Agustus 2019.....	3
Gambar 1.2 Realisasi KUR Menurut Sektor Ekonomi sd 31 Januari 2020	12
Gambar 2.1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	19
Gambar 2.2 Kurva Peacock dan Wiseman.....	21
Gambar 2.3 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave	22
Gambar 2.4 Kurva Isoquan.....	26
Gambar 2.5 Tahapan Alur Penelitian.....	38
Gambar 2.6 Kerangka konseptual.....	38
Gambar 4.1 5 Perusahaan startup dengan value tertinggi di dunia saat ini.....	53
Gambar 4.2 Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia 2015-2019.....	59
Gambar 4.3 Penyaluran KUR Per-Provinsi di Indonesia 2015-2019.....	61
Gambar 4.4 Realisasi Penyaluran KUR di Indonesia 2015-2019.....	63

ABSTRAK

EMIR AKBAR PAISS (1605180024)

ANALISIS EVALUASI DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI INDONESIA

Dalam Skripsi ini, penulis mengangkat judul “ Analisis Evaluasi dan Perkembangan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia Topik ini diangkat dengan fenomena yang terjadi dalam laporan tahunan perekonomian Indonesia bahwasannya pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan jika UMKM di Indonesia tidak dapat dikendalikan secara baik, Tujuan dari penelitian adalah Melakukan analisis deskriptif perkembangan UMKM di Indonesia setelah adanya KUR dan perkembangan UMKM setelah menerima kebijakan KUR serta Untuk mengetahui potensi dan evaluasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis Deskriptif di Indonesia adalah Perkembangan teknologi digital akan memudahkan para pelaku bisnis terutama pelaku UMKM yaitu dapat menekan biaya promosi dan biaya pemasaran sampai ke luar negeri. Peningkatan PDB di Indonesia sebesar 56% merupakan kontribusi dari UMKM, Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia mulai dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif yang cukup tinggi di setiap tahunnya, pada Tahun 2015 usaha mikro di Indonesia 164,87 %, usaha kecil sebesar 215,92 % dan menengah sebesar 359,01% dengan Total UMK sebesar 739,8%,

Kata kunci: Kur,UMKM.Startup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap bangsa berupaya untuk menjadi bangsa maju dan sejahtera. Upaya ini harus didukung oleh pembangunan, dimana pada masa pasca perang dunia kedua pemikiran pada setiap negara selalu berupaya agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam setiap kebijakan pembangunannya guna mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara lain.

Pembangunan sendiri merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dan terus menerus dilakukan untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju yang pada akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri, pembangunan nasional menjadi salah satu indikator menuju perubahan ke arah lebih baik, pembangunan nasional harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap langkah yang diambil semakin mendekati tujuan. Oleh karena itu, salah satu keberhasilan dari pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan.

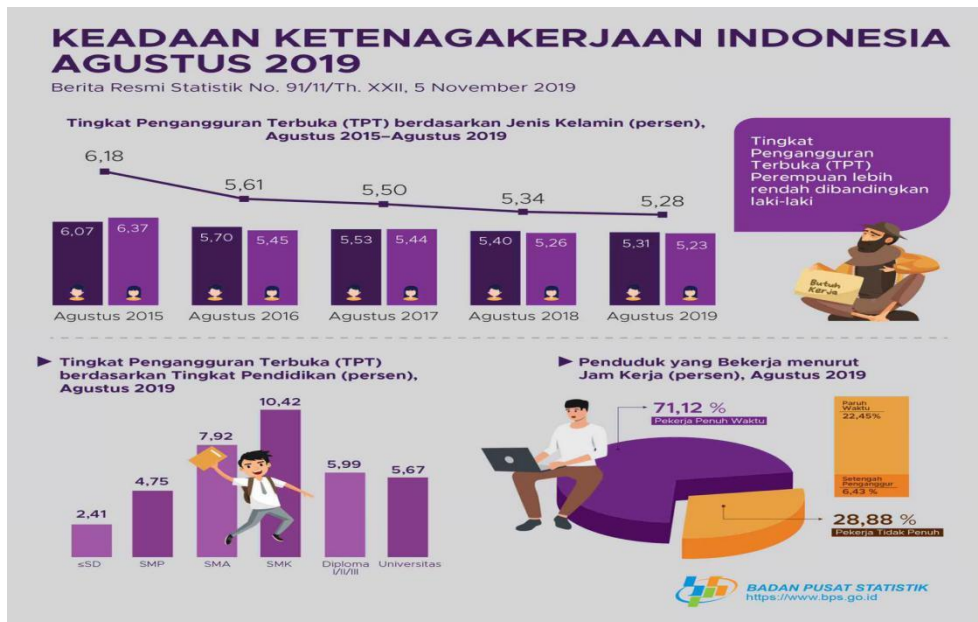
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran. Pemerintah terus membuat strategi agar mengurangi tingkat kemiskinan dan menjamin kesejahteraan masyarakat seperti memberikan subsidi berupa Pendidikan (Kartu Indonesia Pintar/ KIP), kesehatan (Kartu Indonesia Sehat/ KIS), kebutuhan

rumah tangga (Program Keluarga Harapan/ PKH). Namun hal itu tentu tidak produktif untuk menjamin kehidupan masyarakat di masa yang akan datang.

Menurut Todaro (1988) pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan perkapita, namun harus pula melihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk dan mengetahui siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut.

Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu diantaranya adalah tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan kerja yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja.

Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang (*gap*) yang terus membesar. Kondisi tersebut semakin besar setelah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi tidak saja jurang antara peningkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus semakin dalam, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin tinggi.



Gambar 1.1 Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019
(sumber: Badan Pusat Statistik 2019)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada agustus 2019, TPT turun menjadi 5,28% dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,34%. Terdapat 5 orang pengangguran dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia. Jika dilihat dari data penduduk yang bekerja menurut jam kerja (persen) Agustus 2019 tercatat ada sejumlah 6,43% orang setengah pengangguran (orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan) dan 22,45% pekerja paruh waktu (orang yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain). (www.bps.go.id)

Kemiskinan dan pengangguran merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari masalah yang ada di Indonesia. Sumber daya manusia yang masih minim sehingga sulit mendapatkan sumber penghasilan serta kebutuhan ekonomi yang mendesak menjadikan perekonomian masyarakat menjadi sangat lemah. Hal ini merupakan hal yang selalu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan perekonomian masyarakat maka

perlu adanya managerial dari pemerintah, agar program yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga masyarakat perlu adanya sarana pengontrol yang berbasis kemajuan perekonomian masyarakat.

Hal ini yang perlu dicermati kembali bahwa pembangunan ekonomi yang baik harus memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun, serta menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai prioritas utama. Dengan mengembangkan perekonomian rakyat yang didukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, yang nantinya akan menciptakan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan. Terkait dengan hal tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha yang tangguh ditengah krisis ekonomi. UMKM makin tahan banting dan tetap optimis ditengah krisis, hal ini dibuktikan ketika badai krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, usaha berskala kecil dan menengah relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Hal ini dikarenakan mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Bertahannya usaha mikro kecil maupun menengah (UMKM) dalam menghadapi krisis dan kondisi perekonomian yang tidak stabil telah menunjukkan betapa pentingnya sektor ini dalam perekonomian nasional. Pentingnya usaha kecil menengah khususnya di negara berkembang sering dikaitkan dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan yang lainnya. Artinya, keberadaan UMKM diharapkan memberi kontribusi positif terhadap upaya penanggulangan masalah- masalah tersebut di atas (Tulus Tambunan, 2002).

Studi empiris membuktikan bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam menyelamatkan kondisi perekonomian di masa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Menurut (Setiawan 2011), sektor UMKM merupakan katup pengaman bagi para Tenaga Kerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diakibatkan oleh

banyaknya industri besar yang mengalami kolaps pada masa krisis. Adanya UMKM mampu menyelamatkan beberapa tenaga kerja sehingga tidak terjadi pengangguran.

Sektor UMKM dipilih oleh Pemerintah sebagai sektor yang perlu mendapat perhatian lebih karena menurut beberapa ahli dan pengamat ekonomi menyebutkan bahwa UMKM merupakan kekuatan dari perekonomian Indonesia. Meskipun dampak UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tinggi, namun penyebaran efek yang dirasakan di masyarakat sangat luas. Salah satu efek dari penguatan UMKM tersebut adalah terciptanya lapangan pekerjaan yang cukup besar, dan mampu mengurangi angka pengangguran.

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 tentang 2008 tentang UMKM memberikan pengertian dan klasifikasi bahwa: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berikut peneliti lampirkan kriterianya:

**Tabel 1.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-undang No.20 2008 tentang
UMKM**

Skala Usaha	Bersih/Aset	Penjualan/Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	➤ Rp 50 juta – Rp 500 juta	>Rp 300 juta – Rp 2,5 Milyar
Usaha Menengah	➤ Rp 500 juta – Rp 10 Milyar	>Rp 2,5 Milyar – Rp 50 Milyar

(Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)

Perkembangan jumlah UMKM di Indonesia tumbuh sangat pesat. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, jumlah UMKM di Indonesia sampai dengan tahun 2017 mencapai angka 62.924.000 unit usaha. Angka tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 1.270.000 unit dari tahun sebelumnya. Jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah pada tahun 2017 tersebut memiliki proporsi 98,58% dari total unit usaha UMKM dan usaha Besar.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dengan jumlah UMKM pada 2015 sebanyak 3.065.731 orang sedangkan tenaga kerja yang diserap sebanyak 4.950.955 orang (republika.co.id). Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebelumnya yakni sebesar 2.877.765 UMKM dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 4.676.143 orang.

Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha produktif untuk dikembangkan bagi pendukung perkembangan ekonomi makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang. Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan yang ikut terpengaruh, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan karena pengalaman tersebut telah menyadarkan banyak pihak, untuk memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala

mikro, kecil, dan menengah. Persoalan klasik seperti akses permodalan kepada lembaga keuangan pun mulai bisa teratasi. Karena didalam peraturan itu tercantum mengenai perluasan pendanaan dan fasilitas oleh perbankan dan lembaga jasa keuangan non bank.

**Tabel 1.2 Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Triliun Rupiah)
Tahun 2011-2016**

Posisi Kredit	Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Triliun Rupiah)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mikro	88.02	97.18	118.77	140.27	164.87	178.51
Kecil	146.53	164.27	187.73	201.98	215.92	236.30
Menengah	223.61	264.95	303.53	329.47	359.01	367.09
Total UMKM	458.16	526.40	610.03	671.72	739.80	781.91

(Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia)

Berdasarkan tabel diatas posisi kredit total UMKM dari tahun 2011-2016 sangat signifikan. Pada tahun 2011 Rp.485.16 Triliun sampai tahun 2016 terus miningkat sangat signifikan yaitu sebesar Rp.781.91 Triliun dikarenakan jumlah UMKM dari tahun ke tahun terus meningkat.

Keberhasilan yang telah dicapai memiliki titik kelemahan yang harus segera diselesaikan untuk dicarikan solusi yang terbaik. Kelemahan yang dihadapi oleh pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha yang sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator yang mana salah satu dengan lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan dengan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas. Kekhawatiran ini dilandasi bahwa indonesia akan menghadapi MEA dan pasar bebas. Ketika itu terlaksana tuntutananya adalah UMKM harus mampu bersaing.

UMKM di Indonesia masih sarat dengan kelemahan yang menyebabkan mereka sulit untuk mengembangkan usahanya. Beberapa kelemahan yang ada pada UMKM tersebut antara lain adalah kelemahan dalam akses modal, akses teknologi, akses pasar, manajemen keuangan serta sumber daya manusia. Menurut (Setiawan 2011), kondisi UMKM di Indonesia secara umum adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi dan manajemen sederhana
2. Memiliki modal terbatas dan kemampuan memperoleh sumber dana rendah
3. Sistem pembukuan keuangan sangat sederhana
4. Kurang membedakan antara aset pribadi dan aset perusahaan
5. Menghadapin persaingan yang tinggi sehingga marjin keuntungan rendah

Selain kelemahan – kelemahan tersebut menurut (Partomo 2004), UMKM memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang umumnya birokratis.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya memperdayakan UMKM di Indonesia agar lebih memiliki daya saing dalam perekonomian Indonesia. Menurut (setiawan 2011) menyebutkan ada tiga peran penting pemerintah dalam upaya pemberdayaan tersebut yaitu

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara aktif.
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
3. Membuka akses terhadap sumber dinamika pertumbuhan internal UMKM itu sendiri, seperti pembiayaan dan kredit, akses pasar, teknologi, dan perbaikan manajemen.

Dengan perkembangan UMKM yang terus menunjukkan peningkatan, serta kontribusinya yang cukup besar terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah, tidak dapat diingkari bagaimana pentingnya

keberadaan UMKM, besarnya peranan usaha mikro kecil menengah dalam perekonomian nasional dan daerah, sudah sewajarnya UMKM mendapatkan perhatian yang besar. Namun dibalik besarnya populasi dan potensinya, UMKM di Indonesia memiliki masalah yang cukup beragam, yang salah satunya terkait permodalan. Menurut pengamat ekonomi dari Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) Imaduddin Abuddlah ada sekitar 50 persen dari total UMKM kekurangan modal (jurnalasia.com). Mayoritas UMKM menggunakan modal pribadi yang jumlah terbatas. Persoalan permodalan tampaknya merupakan salah satu kendala klasik UMKM. Kelompok UMKM ini sulit mengakses dana ke bank, padahal aksesibilitas kredit dari bank sangat diperlukan UMKM untuk mengembangkan usahanya. Di sisi lain, perbankan juga masih mengalami kesulitan untuk dapat memberikan kredit kepada UMKM, karena pada umumnya walaupun UMKM telah feasible tetapi masih belum bankable.

Dalam menjalankan kegiatan usaha serta upaya meningkatkan keuntungan perusahaan, salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu adalah modal, baik modal sendiri maupun modal yang bersumber dari perbankan. Tanpa adanya modal yang cukup, tentu akan menghambat proses pengadaan barang dan jasa. Kegiatan operasional pun dapat terlambat, sehingga perusahaan pun dapat terhambat, sehingga perusahaan tersebut akan kesulitan dalam memperoleh pendapatan serta keuntungan dari usahanya.

Terkait kendala kurangnya permodalan, dalam hal ini pelaku usaha membutuhkan pinjaman dari perbankan dengan jumlah kredit yang mampu mencukupi kebutuhan dalam mengembangkan usahanya. Kemudian kendala yang kedua masih banyak perbankan yang menetapkan beban kredit (bunga) yang tergolong tinggi sehingga banyak UMKM yang enggan untuk meminjam, sehingga dalam masalah ini pemberian kredit dengan bunga dan angsuran yang ringan dirasa sangat penting mengingat kebutuhan pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan untuk menjalankan usaha dan mengembangkan skala usahanya.

Selain permasalahan diatas, dari pihak nasabah sendiri setelah memperoleh pinjaman kredit usaha seringkali melakukan kesalahan dalam pengguna dana, oleh karena itu perlu dipastikan bahwa dana yang diperoleh pelaku usaha tersebut dimanfaatkan dengan baik dan tidak dialih fungsikan untuk keperluan konsumtif lainnya. Untuk memperoleh hasil yang optimal tentunya pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha harus terus dijalankan, agar penggunaan dana yang diberikan sudah sesuai dengan yang seharusnya, yaitu meningkatkan modal kerja sehingga usaha mereka dapat berkembang dan mampu menjadi penopang perekonomian. (Sumber: <http://repository.ugm.ac.id>)

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi oleh sektor UMKM dalam hal permodalan, serta mengingat bagaimana pentingnya UMKM terhadap perekonomian nasional, dibutuhkan peran pemerintah untuk mengadakan kebijakan ekonomi terkait pemberdayaan ekonomi terkait pemberdayaan UMKM terutama berupa bantuan kredit usaha dengan beban kredit yang ringan dan prosedur yang mudah.

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007 yaitu sebagai respon atas Intruksi Presiden No. 6 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Inpres tersebut ditindak lanjuti dengan ditanda tangannya Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) antara pemerintah, lembaga penjaminan, dan perbankan pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana kemudian diubah dengan addendum pada tanggal 14 Mei 2008 tentang penjaminan/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi atau yang lebih populer dengan istilah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang *feasible* tetapi belum *bankable*. Maksud dari *feasible* adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. *Bankable* yaitu

artinya memenuhi persyaratan dari bank. Program KUR ini dibuat pemerintah dengan skema penyaluran bantuan peminjaman modal berbunga ringan untuk masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang dananya 100% dari bank pelaksana KUR untuk rakyat Indonesia yang produktif dan layak difasilitasi pinjaman kredit dari pemerintah melalui PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo. Karena dananya dari bank pelaksana, maka bunga dan sistem yang digunakan berbeda beda. Bank pelaksana KUR sendiri yaitu bank yang turut menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). (Sumber: <http://www.bank-bri-bca-mandiri> diakses 6 Desember 2017)

Dalam perkembangannya, KUR skema subsidi imbal jasa peminjaman (IJP) sejak November 2007 sampai dengan 31 Desember 2014 telah disalurkan sebesar Rp. 178,85 triliun. Sedangkan kebijakan KUR baru yaitu dengan skema subsidi bunga yang diluncurkan sejak 14 Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 telah tersalurkan sebesar 213,88 triliun. Untuk tahun 2017, jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp 96,7 triliun kepada debitur, dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) sangat kecil, yaitu 0,3%. Untuk realisasi KUR di Indonesia menurut sektor ekonomi, berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2017, paling besar ada pada sektor perdagangan yaitu 57,71% dari plafon yang disalurkan. Kemudian yang kedua pada pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 23,94%. Dan sisanya ada pada sektor lainnya seperti perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan sektor jasa. (Sumber: <http://www.kur.ekon.go.id> diakses 25 Januari 2018).

Secara nasional sampai tahun 2017, pemerintah telah menunjuk atau bekerjasama dengan 34 bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di Indonesia, yang secara rinci dapat dilihat diatas. Berikut merupakan beberapa bank yang berhasil merealisasikan penyaluran KUR terbesar terhitung per 30 oktober 2017, yaitu: Bank BRI dengan total plafon sebesar Rp.53,8 triliun kepada 3.213.000 debitur, diikuti Bank Mandiri sebesar Rp.1,74 triliun

kepada 89.772 debitur, Bank BRI Syariah sebesar Rp. 380,36 triliun kepada 17.141 debitur. (Sumber www.kur.ekon.go.id diakses pada 14 Desember 2017)

Untuk tujuan ini, pemerintah telah menyuntikkan modal sebesar Rp. 1,45 triliun kepada perum sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) yang digunakan sebagai jaminan kredit 70% atas kredit yang disalurkan dengan menggunakan dana bank-bank pelaksana. KUR ini disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dengan bunga maksimum 16% dan jumlah kredit maksimum Rp. 500 juta per debitur yang disalurkan melalui enam bank pelaksana, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk. PT Bank Bukopin Tbk., PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri. Penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni perdagangan, pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan dan perindustrian.

Dalam realisasinya pemyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dilaksanakan dapat dilihat dari sektor ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.2 Realisasi KUR Menurut Sektor Ekonomi sd 31 Januari 2020
(sumber: Kredit Usaha Rakyat)

Berdasarkan gambar diatas realisasi KUR menurut sektor ekonomi sampai dengan Januari 2020. Perdagangan menunjukkan jumlah yang paling banyak dalam merealisasikan

KUR yaitu sebesar 42,32% selanjutnya di susul oleh sektor pertanian, pemburuan dan kehutanan jumlah realisasi KUR sebesar 28,09%, kemudian untuk sektor lain- lainnya yaitu sebesar 15,97% selanjutnya terdapat sektor industri pengolahan yaitu sebesar 11,67%, dilihat melalui sektor perikanan jumlah realisasi KUR sebesar 1,80% dan sektor konstruksi yang paling minim dengan jumlah sebesar 1,50%. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam merealisasikan KUR paling dominan terdapat di sektor perdagangan yaitu sebesar 42,32%.

Tabel 1.3 Penyaluran KUR Berdasarkan Provinsi Tahun 2020

No	Provinsi	Total Penyaluran KUR	
		Plafon	Jml. Debitur
1	Nangroe Aceh Darussalam	22.531.000.000	1
2	Sumatera Utara	599.623.680.000	15.185
3	Sumatera Barat	433.781.030.000	10.585
4	Riau	361.750.300.000	6.697
5	Jambi	253.818.189.816	4.579
6	Sumatera Selatan	379.177.000.000	7.797
7	Bengkulu	161.538.530.000	3.776
8	Lampung	415.515.383.792	14.758
9	Kepulauan Riau	100.123.247.000	1.745
10	Kepulauan Bangka Belitung	82.828.000.000	2.084
11	DKI Jakarta	393.333.579.743	9.228
12	Jawa Barat	1.915.778.174.705	62.731
13	Jawa Tengah	3.132.227.191.800	103.599
14	DI Yogyakarta	331.842.991.000	8.977
15	Jawa Timur	3.041.616.873.087	103.657
16	Banten	285.605.471.000	6.914
17	Bali	727.459.700.000	14.178

18	Nusa Tenggara Barat	303.589.828.000	8.378
19	Nusa Tenggara Timur	147.380.614.000	3.748
20	Kalimantan Barat	148.006.000.373	3.329
21	Kalimantan Tengah	144.185.257.369	3.559
22	Kalimantan Selatan	342.928.749.830	9.367
23	Kalimantan Timur	242.300.100.000	5.686
24	Kalimantan Utara	34.046.000.000	702
25	Sulawesi Utara	86.974.931.399	2.054
26	Sulawesi Tengah	163.724.500.000	4.195
27	Sulawesi Selatan	943.902.894.400	28.865
28	Sulawesi Tenggara	199.230.885.944	5.075
29	Gorontalo	93.863.440.000	3.520
30	Sulawesi Barat	77.486.500.000	1.813
31	Maluku	63.321.100.000	1.788
32	Maluku Utara	34.037.000.000	775
33	Papua Barat	39.229.000.000	960
34	Papua	106.171.450.000	2.370
	Nasional	15.808.928.593.258	462.675

(Sumber: <https://kur.ekon.go.id/>)

Penyaluran KUR menurut sebaran wilayah selama tahun 2020 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah masih memiliki penyaluran tertinggi yaitu sebesar Rp. 3,132 triliun, selanjutnya Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 16,3 triliun, dan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 3,047 triliun. Sedangkan untuk luar Jawa, penyaluran KUR tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 949 triliun dan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 599 triliun. (<https://kur.ekon.go.id/>)

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk “ **Analisis Perkembangan Dan Evaluasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia** “

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Krisis ekonomi yang terjadi telah menurunkan daya saing ekonomi nasional yang menyebabkan banyak usaha-usaha besar yang gulung tikar.
2. Kendala UMKM dalam hal ini pelaku usaha sulit mendapatkan pinjaman KUR dengan jumlah kredit yang mampu mencukupi kebutuhan dalam mengembangkan usahanya.
3. Masih ditemukan ketidakmerataan penerima pinjaman KUR terhadap usaha UMKM

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia setelah kebijakan penyaluran KUR dari tahun 2015 – 2019

1. Bagaimana perkembangan klasifikasi dari UMKM setelah menerima kebijakan penyaluran KUR di Indonesia dari tahun 2015 – 2019
2. Provinsi mana yang paling banyak yang menerima kebijakan penyaluran KUR di Indonesia dari tahun 2015 – 2019
3. Bagaimana perkembangan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia

1.4 Batasan Masalah

Supaya mendapat temuan yang terfokus terhadap peningkatan usaha mikro, ketepatan penggunaan dana jumlah kredit, beban kredit, dan prosedur berdasarkan penilaian yang diberikan kepada nasabah KUR dan penelitian ini hanya dibatasi pada peserta penerima kebijakan KUR di Indonesia

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melakukan analisis deskriptif perkembangan UMKM di Indonesia setelah adanya KUR
2. Untuk mengetahui potensi dan evaluasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia
3. Melakukan analisis deskriptif perkembangan UMKM setelah menerima kebijakan KUR

1.6 Manfaat Penelitian

a. Bagi Mahasiswa

1. Sebagai bahan gambaran kepada mahasiswa yang ingin tahu tentang potensi dan evaluasi kebijakan KUR bagi UMKM di Indonesia. Terutama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi mahasiswa Ekonomi khususnya mahasiswa Ilmu Ekonomi Study Pembangunan.

b. Bagi Universitas

1. Untuk Menambah dan melengkapi sekaligus sebagai pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada yang menyangkut topik yang sama.
2. Sebagai referensi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

c. Bagi Masyarakat dan Pemerintah.

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan yang tepat, terutama yang berkaitan dengan kebijakan KUR di Indonesia.
2. Dan semoga dapat menjadi bahan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengeluaran Pemerintah

Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera pemerintah menjalankan berbagai macam program pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah dalam melakukan pembangunan membutuhkan dana yang cukup besar, pengeluaran pemerintah mencerminkan kombinasi produk yang dihasilkan untuk menyediakan barang publik dan pelayanan kepada masyarakat yang memuat pilihan atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah (Usmaliadianti, 2001)

2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. Teori pengeluaran pemerintah 22ada dua bagian, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro (Mangkoesoebroto, 1994)

2.1.2 1.1 Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti rill dapat diamati sebagai indikator besarnya biaya pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar juga pengeluaran pemerintah pemerintah yang bersangkutan (Suparmako, 1987)

Dalam teori ekonomi makro menurut Boediono (1999) pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa negara
2. Pengeluaran pemerintah untuk menggaji pegawai pemerintah negara
pengeluaran pemerintah untuk perubahan menggaji pegawai pemerintah negara

mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, dimana perubahan gaji akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung

3. Pengeluaran pemerintah untuk suatu proses yaitu *transfer payment*

transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warga yang meliputi: pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis *transfer payment* mempunyai status yang berpengaruh dengan pos gaji pegawai pemerintah meskipun secara administrasi keduanya berbeda (Boediono, 1999)

Teori perkembangan pemerintah dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu, apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap, ataukah beberapa tahap dapat terjadi dalam tahap demi tahap, ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara bersamaan.

1. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Pernyataan ini oleh wagner disebut dengan hukum yang selalu meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama karena disebabkan pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, reaksi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesubroto, 1994)

Kelemahan teori wagner adalah karena teori tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandagannya dengan suatu

teori yang disebut organis mengenai pemerintah (*organic theory of state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

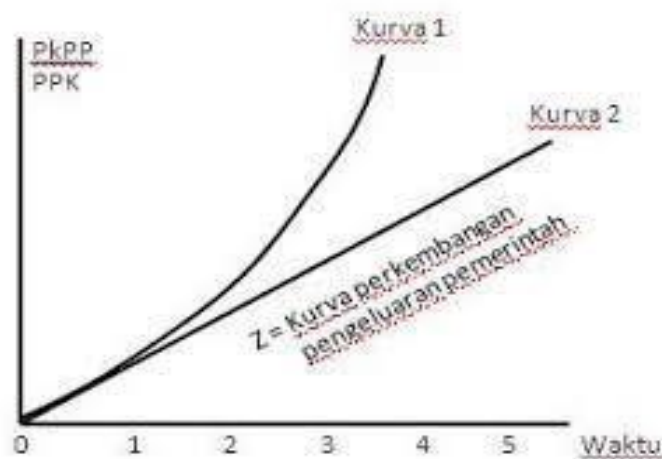
Hukum Wagner diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PPkP}{.PPK1} < \frac{PkPPn}{PkPPn} < \dots < \frac{PkPPn}{PPKn}$$

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2 ... n : Jangka waktu (tahun)



Gambar 2.1

Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Sumber: Mangkoesuebroto 1994

2. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan dan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadi perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi (Dumairy, 1997)

Musgrave dalam Norista (2010) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase terhadap PDB semakin besar dan presentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

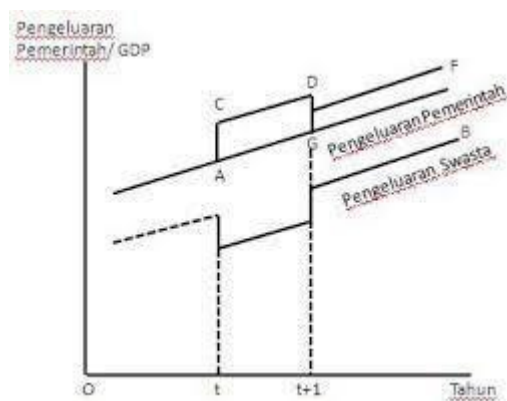
3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha membesarkan pengeluarannya dengan mengandalkan besarnya penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi puncak kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek ini disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini:

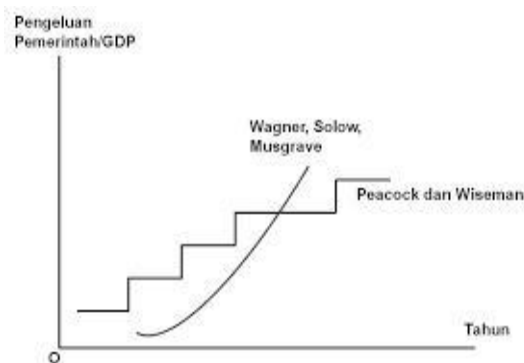


Gambar 2.2

Kurva Peacock dan Wiseman

Sumber: Boediono, 1999

Dalam keadaan normal, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam presentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva dibawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



Gambar 2.3

Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave

Sumber: Boediono, 1999

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Solow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk yang ekspesional, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mngatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi dan yang ditetapkan pemerintah, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya (Mangkoesoebroto, 1993).

2.1.2 1.2 Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan

penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain (Mangkoesoebroto, 1993).

Pengeluaran pemerintah untuk barang publik akan menstimulasi pengeluaran untuk barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi faktor-faktor dibawah ini (Bastian, 2010):

- a. Perubahan permintaan akan barang publik
- b. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- c. Perubahan kualitas barang publik
- d. Perubahan harga faktor-faktor produksi

1. Penentuan Permintaan

$$U^1 = f(G, X)$$

Dimana: U = Fungsi Utilitas

I = Individu, 1, 2, ..., m

G = Vektor barang pemerintah

X = Vektor barang swasta

Seseorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (permintaan dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak G_k . Untuk menghasilkan i barang K sebanyak G_k , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjaga keamanan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat.

2. Penentuan Tingkat Output

$U_p =$ Fungsi Utilitas

Dimana $U_p = g(X, G, S)$

$S =$ Keuntungan yang diperoleh politisi

$G =$ Vektor barang pemerintah

$X =$ Vektor barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih:

$$\text{Max } U_i = f(X, G)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya:

$$P \cdot X + tB < M_i$$

Dimana: $P =$ Vektor harga barang swasta

$X =$ Vektor barang swasta

$B_i =$ Basis pajak individu 1

$M_i =$ Total pendapatan individu

$T =$ Tarif pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses, yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga ia bertindak sebagai pengambilan harga (*price taker*) atau asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang publik. Sehingga ia bertindak sebagai pengambilan output (*Output Taker*)

2.1.2 1.3 Teori Produksi

1. Produksi

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi ini tidak hanya terbatas pada pembuatannya saja tetapi juga menyimpan, distribusi,

pengangkutan, pengeceran dan pengemasan kembali atau yang lainnya (Millers dan Meiners, 2000)

Produksi adalah suatu proses dimana barang dan jasa yang disebut input diubah menjadi barang-barang dan jasa-jasa lain yang disebut output. Banyak jenis-jenis aktifitas yang terjadi didalam proses produksi, yang meliputi perubahan-perubahan bentuk, tempat, dan waktu penggunaan hasil-hasil produksi. Masing-masing perubahan ini meyangkut penggunaan input untuk menghasilkan output yang diinginkan. Guna atau manfaat mengandung pengertian kemampuan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi produksi meliputi semua aktivitas menciptakan barang dan jasa (Ari Sudarman, 1999).

2. Fungsi Produksi

Fungsi produksi adalah hubungan diantara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Faktor-faktor produksi yang diciptakan terdiri dari tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawaan. Dalam teori ekonomi, menganalisis mengenai produksi selalu dimisalkan bahwa tiga faktor produksi (tanah, modal, keahlian keusahawaan) adalah tetap jumlahnya. Hanya tenaga kerja yang dipandang sebagai faktor-faktor produksi dengan tingkat output yang dihasilkan apabila input yang digunakan adalah tenaga kerja, modal dan kekayaan alam dapat dirumuskan melalui persamaan berikut ini (Sakodono Sukirno, 1994:94):

$$Q = f (K,L)$$

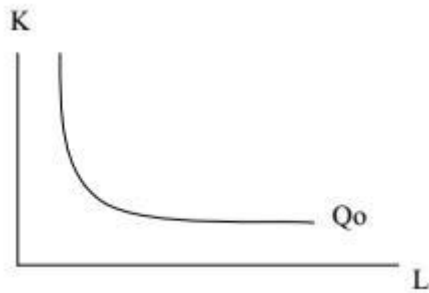
Dimana:

Q adalah output

K adalah input capital

L adalah input tenaga kerja

Berbagai kombinasi input yang menghasilkan tingkat output yang sama digambarkan dalam kurva isoquant. Isoquant adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi input (K dan L) yang menghasilkan satu tingkat produksi.



Gambar 2.4

Kurva Isoquan

Lereng kurva isoquant (dk/dl) merupakan tingkat batas penggantian secara teknisa (marginal of techinal subsitution = MRTS, yaitu berkurangnya satu input per unit akibat kenaikan input lain untuk mempertahankan tingkat output yang sama antara K dan L, adalah sama dengan perbandingan antara produksi marginal tenaga kerja dan produksi marginal modal. Bentuk kurva isoquant cembung terhadap titik origin berarti bahwa MRTS semakin menurun dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang digunakan. Makin produktif faktor tenaga kerja semakin besar kemampuannya untuk menggantikan modal ($dk > dl$ dan $dq/dl > dq/dk$). Dalam keadaan demikian bentuk kurva isoquant makin curam , sebaliknya semakin produktif faktor modal maka semakin besar kemampuannya untuk menggantikan tenaga kerja sehingga bentuk kurva isoquant semakin landai.

Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan (Q) dan variabel yang menjelaskan (X). Variabel yang menjelaskan biasanya berupa output yang menjelaskan biasanya berupa input. Secara matematis, hubungan ini dapat ditulis sebagai berikut (Soekartawi, 2003):

$$Q = f (X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$$

Dimana:

Q adalah tingkat produksi (output) dipengaruhi faktor X

X adalah berbagai input yang digunakan atau variabel yang mempengaruhi Q

3. Fungsi Produksi Cobb-Douglas

Fungsi produksi cobb-douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua variabel atau lebih variabel. Dimana variabel yang satu disebut dengan variabel (Y) dan variabel lain yang menjelaskan disebut independent (X) (Soekartawi, 2003)

Secara sistematis fungsi Cobb-Douglas dapat dituliskan:

$$Y = a X_1^{b_1} X_2^{b_2} \dots X_i^{b_i} \dots X_n^{b_n} e^u$$

Keterangan:

Y = produksi

a = intersep

b^i = koefisien regresi penduga variabel ke-i

X^i = jenis faktor produksi ke-i dimana $i = 1, 2, 3, \dots, n$

e = bilangan natural ($e = 2, 7182$)

u = unsur sisa (galat)

Pada persamaan tersebut terlihat bahwa nilai $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n$ adalah tetap variabel yang terlihat telah dilogartmakan. Hal ini karena $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n$ pada fungsi cobb-douglas menunjukkan elastisitas X terhadap Y, dan jumlah elastisitas merupakan retrun to scale (Soekartawi, 2003).

Fungsi produksi Cobb-Douglas sering digunakan dalam penelitian ekonomi praktis dengan model fungsi produksi Cobb-Douglas dapat diketahui beberapa aspek produksi, seperti produksi marginal (*marginal product*), produksi rata-rata (*Average product*), tingkat kemampuan batas untuk mendistribusikan (*marginal rate of subsitution*), intensitas penggunaan faktor produksi (*factor intensity*), efisiensi produksi (*efisiensi of prodoction*), secara mudah dengan jalan manipulasi secara sistematis (Ari Sudarman, 1997).

Ada tiga alasan pokok mengapa fungsi Cobb-Douglas lebih banyak dipakai oleh para peneliti, yaitu (Soekartawi, 1993):

- a. Penyelesaian fungsi Cobb-Douglas relative lebih mudah dibandingkan dengan fungsi yang lain.
- b. Hasil pendugaan garis melalui fungsi Cobb-Douglas akan menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus juga menunjukkan besaran elastisitas,
- c. Besaran elastisitas tersebut sekaligus menunjukkan tingkat besaran *returns to scale*.

2.2 Regulasi

2.2.1 Peraturan Undang-Undang

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007 yaitu sebagai respon atas Intruksi Presiden No. 6 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Inpres tersebut ditindak lanjuti dengan ditanda tangannya Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) antara pemerintah, lembaga penjaminan, dan perbankan pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana kemudian diubah dengan addendum pada tanggal 14 Mei 2008 tentang penjaminan/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi atau yang lebih populer dengan istilah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Adapun pengertian Kredit Usaha Rakyat menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PML.05/2015 ialah Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dari investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak, Kredit Usaha Rakyat adalah program yang dirancang oleh pemerintah namun sumber dananya sepenuhnya berasal dari bank.

Yang menjadi dasar hukum bagi Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatur mengenai penyaluran KUR kepada UMKM sehingga meningkatkan pembiayaan UMKM. KUR disalurkan oleh bank-bank pelaksana yang ditetapkan oleh MoU tentang penjaminan kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Sebelum bank-bank pelaksana menyalurkan KUR sebagaimana dapat dilihat pada pasal 3, menentukan prioritas bidang usaha yang *feasible* tetapi belum *banklable* yang akan menerima fasilitas pinjaman atau kredit. Dengan adanya panduan mengenai ketentuan prioritas bidang usaha dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara untuk menyediakan dana imbalan jasa penjamin, bank pelaksana menyusun Rencana Target Penyusun (RTP) KUR.

2.2.2 Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat adalah dana peminjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp.5 juta sampai dengan Rp.500 juta. Agunan pokok KUR adalah usaha yang dibiayai, namun pemerintah membantu menanggung melalui program penjaminan hingga maksimal 70 persen dari plafon kredit. Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Lembaga penjamin yang terlibat adalah 2 lembaga penjamin nasional, yaitu PT. Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) dan PT. Askrindo dan 2 lembaga penjamin daerah, yaitu PT. Penjamin Kredit Daerah Jawa timur (Jamkrida Jatim) dan PT. Jamkrida Bali Mandra.

Terdapat tiga skema KUR yaitu:

- a. KUR Mikro dengan plafon sampai dengan Rp.20 juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 22 persen per tahun

- b. KUR Ritel dengan plafon Rp. 20 juta sampai dengan Rp. 500 juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 13 persen per tahun
- c. KUR Linkage dengan plafon sampai dengan Rp. 2 Milyar. KUR Linkage biasanya menggunakan lembaga lain, seperti Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan lembaga keuangan Non-Bank, untuk meneruskan pinjaman KUR dari Bank pelaksana kepada UMKM.

A. Tujuan Pelaksana Program KUR

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.

Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan koperasi kepada lembaga keuangan.
- c. Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

B. Sasaran Program KUR

Sasaran program KUR yaitu kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan sebagainya. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK. Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.

C. Manfaat Program KUR

Bagi UMKMK, manfaat KUR membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Sementara bagi Pemerintah, manfaat KUR adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kerja serta pertumbuhan ekonomi yang semakin maju.

2.2.3 Usaha Kecil dan Menengah

A. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Di Indonesia definisi UKM menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang pengertian usaha kecil setidaknya berpenghasilan Rp.50.000.000,- dalam kurung waktu 1 tahun.

Sedangkan definisi dari usaha menengah menurut Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 yang dikutip oleh Suhardjono adalah kegiatan ekonomi rakyat dimana kegiatan ekonomi tersebut mempunyai kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari Rp.50.000.000,- sampai paling banyak Rp.500.000.000,-. Namun hal tersebut masih menjadi perdebatan antar bank-bank di Indonesia.

Pengertian UKM adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang ekonomi dimana berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan total pendapatan (tidak termasuk tanah dan bangunan) usaha kecil setidaknya kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- dalam kurung waktu satu tahun, dan usaha menengah dengan pendapatan 1 tahun lebih dari Rp.50.000.000,-.

B. Jenis dan Bentuk Usaha Kecil

Menurut Wibowo yang dikutip oleh Tulus, kegiatan perusahaan pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis usaha, yaitu:

- a) Jenis usaha perdagangan distribusi, dimana usaha ini bergerak dalam kegiatan memindahkan barang produksi ke konsumen. Biasanya usaha ini bergerak dibidang pertokoan, warung, rumah makan, dan lain sebagainya.
- b) Jenis usaha produksi, adalah jenis usaha yang bergerak dalam kegiatan menjadikan bahan mentah menjadi barang jadi yang mampu menjadi nilai tambah untuk dipasarkan. Kegiatan ini dapat berupa industri pangan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya.
- c) Jenis usaha komersial, usaha ini bergerak dalam kegiatannya pelayanan atau menjual jasa sebagaimana kegiatan utamanya. Contoh seperti asuransi, bank konsultan, biro perjalanan dan lain sebagainya.

C. Karakteristik Usaha

Menurut hasil studi Lembaga Manajemen Ekonomi Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa indonesia kriteria usaha kecil itu sangat berbeda- beda, tergantung pada fokus permasalahan yang dituju dan instansi yang berkaitan dengan sektor ini.

Secara umum sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Sistem pembukaan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti administrasi pembukuan standar.
- b) Margin usaha yang cenderung tipis mengigit persaingan yang sangat tinggi.
- c) Modal terbatas.
- d) Pengalaman manajerial dalam mengelola usaha masih sangat terbatas.
- e) Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diverifikasi pasar sangat terbatas.

- g) Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

D. Keunggulan dan Kelemahan Usaha

Dibanding dengan usaha besar, usaha kecil memiliki beberapa potensi dan keunggulan komperatif, yaitu:

- a) Usaha kecil beroperasi menyebar di seluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha.
- b) Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah.
- c) Sebagian besar usaha kecil dapat dikatakan padat karya yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana.

Sedangkan kelemahan usaha kecil adalah investasi awal saja dapat mengalami kerugian. Beberapa resiko diluar kendali dari wiraswastawan, seperti perubahan mode, peraturan pemerintah, persaingan dan masalah tenaga kerja dapat menghambat bisnis. Beberapa bisnis juga cenderung menghasilkan pendapatan yang tidak teratur, pemilik mungkin tidak memperoleh profit.

E. Model Usaha

Bagi pengembangan usaha kecil, masalah modal merupakan kendala besar. Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan untuk modal dasar maupun untuk langkah-langkah pengembangan usahanya, yaitu: melalui kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal pentura, pinjaman dari dana penyisihan sebagai laba, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah dan jenis-jenis pembiayaannya.

Sesuai dengan karakteristik usaha kecil, modal ventura merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang tahap awal biasanya mengalami kesulitan modal, membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan dan membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran usaha.

Keberadaan lembaga modal ventura sebenarnya telah dikenal relatif lama di Indonesia. Namun demikian secara formal baru dikenal bersamaan diluncurkannya paket kebijakan tentang lembaga pembiayaan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
Anis Ayu Purwati Ningsi	Pengaruh KUR terhadap pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil pada sektor pertanian di kecamatan kepung kabupaten Kediri	KUR berpengaruh positif terhadap usaha mikro dan kecil karena terjadinya peningkatan omset atau pendapatan usaha
Hana Erlinda	Analisis pengaruh pemberian KUR terhadap kinerja usaha kecil di kota Makassar	KUR berpengaruh positif terhadap kinerja usaha kecil di kota Makassar

		dilihat dari indikatornya pendapatan dan meningkatkan produksi barang untuk UMKM
Frenky Tanni Wijaya	Pengaruh program kredit usaha rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa teluk panji kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhan batu selatan	Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Program Kredit Usaha Rakyat memiliki pengaruh terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Teluk Panji. Nilai R-Square menunjukkan pengaruh sebesar 0,079 atau 7,9%. Hasil uji t dan uji F penelitian menunjukkan bahwa secara signifikan memberikan pengaruh secara parsial dan simultan terhadap kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. Pengaruh dilihat

		berdasarkan kondisi ekonomi, pekerjaan, pendidikan dan kesehatan
Harera angga kusuma	Analisis factor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) periode 2009-2011	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara Inflasi terhadap KUR, SBI berpengaruh negatif terhadap penyaluran KUR, PDB berpengaruh negatif terhadap KUR, NPL tidak berpengaruh terhadap KUR, dan CAR tidak berpengaruh terhadap KUR. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi Perubahan KUR adalah PDB. Sedangkan KUR mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu Inflasi,

		SBI, PDB, NPL dan CAR sebesar 49,6%.
Ari Syofwan	Peranan kredit usaha rakyat terhadap pengembangan umk di kecamatan gebang kabupaten langkat (studi kasus BRI kecamatan gebang)	Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif terhadap Usaha Mikro dan Kecil (UMK), ini terlihat dari beberapa indikator seperti peningkatan omset produksi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Gebang

2.4 Tahapan Alur

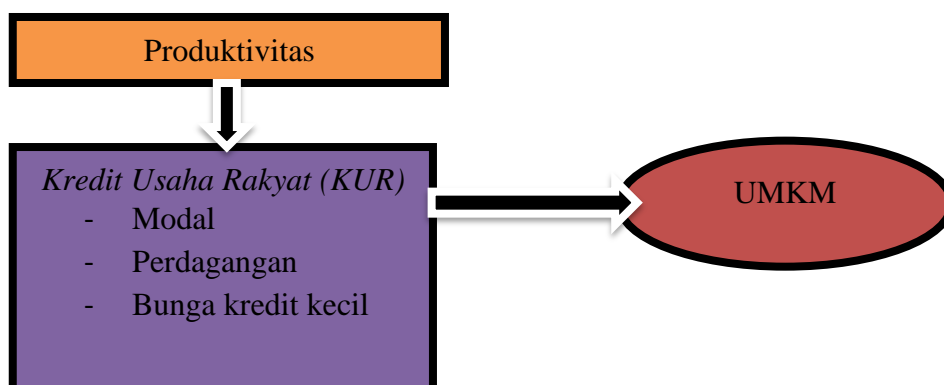
2.4.1 Tahapan Alur Penelitian



Gambar 2.5

Tahapan Alur Penelitian

2.5 Kerangka Konseptual



Gambar 2.6

Kerangka konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah mini riset kuantitatif yang dimana bertujuan menganalisis variabel yang berhubungan dengan evaluasi dan perkembangan kebijakan kredit usaha rakyat bagi usaha mikro kecil menengah di Indonesia yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah. Data yang akan diteliti adalah data kredit usaha rakyat bagi usaha mikro kecil menengah di Indonesia yang bersumber dari website Kredit Usaha Rakyat dan website Bank Indonesia serta jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tujuan pustakayang digunakan untuk melakukan penelitian dimana variabel yang satu dengan yang lainnya dapat berhubungan sehingga penelitian sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun variable yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1

No	Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
1	KUR (Kredit Usaha Rakyat)	layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada para Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) atau usaha yang	Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian https://kur.ekon.go.id/

		feasible namun belum bankable.	
2	UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)	Suatu usaha produktif yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang mencakupi di semua sektor ekonomi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah http://www.depkop.go.id/
3	Modal	Biaya yang dihabiskan untuk mendirikan suatu modal usaha terhadap UMKM	Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian https://kur.ekon.go.id/
4	Perdagangan	Pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang ditempat lain untuk memperoleh keuntungan.	Kementerian Perdagangan https://www.kemendag.go.id/id
5	Bunga Kredit Kecil	Suatu harga yang harus dibayarkan oleh debitur kepada bank atas pinjaman yang telah diberikan.	Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian https://kur.ekon.go.id/

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data seluruh provinsi di Indonesia yang disediakan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Kementerian Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yaitu Maret sampai Mei 2020.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Berdasarkan Bentuk : Data Kuantitatif
2. Berdasarkan Sumber Data : Data Sekunder

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data secara sekunder melalui website Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah, Kementerian Bidang Perekonomian, Kementrian Keuangan dan Badan Pusat Statistik.

3.6 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data sesuai dengan pendapat objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data sesuai dengan pendapat. Menurut Husein Umar (2005) “objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian akan dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu.” Berdasarkan penelitian ini menyimpulkan

objek penelitiannya adalah kebijakan kredit usaha rakyat bagi usaha mikro kecil menengah di Indonesia.

3.7 Tahapan Penelitian

3.7.1 Metode Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2014)

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kredit usaha rakyat bagi usaha mikro kecil menengah di Indonesia pada tahun 2015-2019

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif Perkembangan UMKM Era Industri 4.0

Dalam pengembangan ekonomi nasional, sudah sepatutnya juga UMKM menjadi prioritas karena UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang mampu mengurangi permasalahan kemiskinan serta pengembangannya pun memperluas basis ekonomi serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian. Terlebih lagi ditengah arus globalisasi dan tingginya persaingan, UMKM juga harus mampu menghadapi tantangan global seperti peningkatan inovasi produk dan jasa, pengembangan SDM dan teknologi serta perluas akses pemasaran sehingga dapat menambah nilai jual UMKM dalam bersaing dengan produk-produk luar yang semakin mendominasi. Signifikansi kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi ini bisa dilihat diantaranya melalui peluang terbukanya lapangan kerja yang jauh lebih luas, peningkatan devisa, pajak penghasilan maupun penjualan dan juga, kesempatan pengembangan sumber daya manusia.

Secara historis, perhatian pemerintah Indonesia dalam mendorong sektor UMKM mengalami dinamika naik turun. Pada masa orde baru, Minimnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap UMKM, salah satunya disebabkan oleh peran pemerintah pusat yang sangat besar didalam perekonomian nasional, yang didukung pula oleh sistim pemerintahan yang terpusat (sentralistik). Pemerintah daerah pada dasarnya adalah pelaksana kebijakan pemerintah pusat yang tidak memiliki otonomi untuk mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Melalui sejumlah perusahaan milik negara (Badan Usaha Milik Negara—BUMN), pemerintah berperan penting dalam mengembangkan beberapa sektor ekonomi seperti industri manufaktur, perdagangan, dan jasa. Sementara itu, dari segi pendapatan negara, BUMN yang mengeksport minyak dan gas memberikan sumbangan pendapatan yang cukup signifikan bagi negara. Hal ini pada gilirannya menjadikan UMKM berada pada posisi minor berhadapan

dengan perusahaan-perusahaan negara. Perhatian yang serius terhadap UMKM baru ditunjukkan pemerintah setelah memasuki dekade 1980-an, ketika pendapatan negara dari ekspor minyak dan gas mulai menurun secara drastis. Pada waktu itu, pemerintah mulai mendorong.

Dalam perkembangan era Industri yang menekankan aspek produksi dan komunikasi real time kapan saja dan berhubungan langsung dengan teknologi digital dan internet sekarang ini (industry 4.0), sudah seharusnya Indonesia memiliki rencana pengembangan UMKM dan mengantisipasi hal-hal yang berkenaan dengan langkah apa yang akan diambil Indonesia berdasarkan pembacaan yang matang mengenai identifikasi peluang dan tantangan, agar Indonesia dapat memetik manfaat positif. Jangan sampai Indonesia hanya berposisi sebagai penonton dan menjadi obyek pasar yang masif bagi hasil-hasil produksi negara-negara lain. Terlebih jika dilihat dari sisi potensi dan modal yang dimiliki Indonesia dengan sumber daya alam terkaya dan sumber daya manusia terbesar di ASEAN.

Era revolusi industri 4.0 merupakan era perkembangan teknologi digital menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi digital akan memudahkan para pelaku bisnis terutama pelaku UMKM yaitu dapat menekan biaya promosi dan biaya pemasaran sampai ke luar negeri. Peningkatan PDB di Indonesia sebesar 56% merupakan kontribusi dari UMKM (Kompas, 2018). UMKM sering disebut sebagai sektor ekonomi yang penting bagi perekonomian nasional karena memberikan kontribusi bagi PDB Indonesia dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.

Berdasarkan studi dari Mc. Kinsey institute dinyatakan bahwa apabila UMKM memanfaatkan e-marketplace untuk berjualan, maka UMKM dapat berkembang dua kali lebih cepat dibandingkan tanpa e-marketplace. Namun, menjadi tidak signifikan ketika sejumlah 59,9 juta UMKM di Indonesia hanya 3,97 juta UMKM yang sudah memanfaatkan e-marketplace untuk menjual produknya. Oleh karena itu Kementrian Kominfo bekerjasama

dengan perusahaan e-marketplace mendukung gerakan ayo berjualan online (Kompas, 2018). Hal ini tentunya ditujukan untuk mendorong UMKM Indonesia agar mampu bersaing dengan produk luar melalui e-marketplace.

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Jika hal ini berlanjut, OECD memprediksi akan terjadi penurunan tingkat output antara seperlima hingga seperempat di banyak negara, dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar sepertiga, tentu mengancam juga perekonomian nasional Indonesia. Aknolt Kristian Pakpahan menyebutkan ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi).

Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan

keuangan, serta eksistensi UMKM. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluarannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kebijakan social distancing yang kemudian diubah menjadi physical distancing dan bekerja dari atau di rumah berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya. Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank yang sudah meminta kelonggaran batas dan besaran pembayaran cicilan hutang dan kredit kepada bank. Belum lagi para pengusaha harus memperhatikan fluktuasi nilai tukar rupiah yang akan mengganggu proses produksi terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor. Selain itu, pandemi ini menyebabkan ancaman kaburnya investasi asing dari Indonesia yang tentu mengancam proyek-proyek strategis pemerintah. Pada aspek UMKM, adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada sisi suplai yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit. Dalam situasi pandemi ini, menurut Kemenkop UKM ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek

pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah.

4.1.1 Startup Bisnis Indonesia Yang Bisa Menembus Unicorn Dunia

Di era serba digital ini, semua kebutuhan customer atau pasar terkait dengan kegiatan e-commerce. Data Sensus Ekonomi pada tahun 2016 lalu yang didapat dari Badan Pusat Statistik menyatakan dalam sepuluh tahun terakhir industri e-commerce di Indonesia tumbuh sekitar 17% dengan total unit usahanya mencapai 26,2 juta. McKinsey dalam laporannya yang berjudul “Unlocking Indonesia’s Digital Opportunity” juga memperkirakan, peralihan ke ranah digital akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia hingga US\$ 150 miliar dolar pada 2025. Laporan itu juga menyatakan bahwa 73% pengguna internet di Indonesia mengakses internet melalui smartphone dan angka ini diperkirakan akan terus bertambah dalam lima tahun ke depan. Masifnya penggunaan telepon seluler pintar ini juga akan jadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia.

Inilah mengapa banyak startup dibuat dan dikembangkan di Indonesia, khususnya startup yang berbasis teknologi atau di bergerak ranah digital. Berdasarkan berita yang dilansir oleh Liputan6 , Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sendiri menargetkan Indonesia bakal memiliki sebanyak lima startup Unicorn di tahun 2019. Hal ini disampaikan oleh Rudiantara dalam konferensi pers Japan-Indonesia Innovation Meet Up Event di Jakarta bulan September lalu. Pemerintah dikabarkan ingin membantu perkembangan startup di Indonesia dengan mengundang banyak investor.

4.1.2 Star Up Di Indonesia dan Peran Dalam Membangun Indonesia

Biasanya, startup menawarkan produk/jasa yang saat ini belum ditawarkan atau belum terlalu dikenal di pasaran. Di awal pembentukan sebuah startup, biasanya biaya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kebanyakan perusahaan startup biasanya disponsori oleh orang lain, perusahaan lain, atau uang pinjaman bank.

Satu hal yang dapat disebut sebagai atribut paling penting dalam sebuah startup adalah kemampuannya untuk bertumbuh. Menurut Paul Graham seorang venture capitalist dan startup accelerator, menjelaskan bahwa fokus sebuah startup adalah pertumbuhan bisnis. Menurut Paul Graham, startup adalah sebuah perusahaan yang didesain untuk bisa diukur dengan cepat. Fokus dengan pertumbuhan, sebuah startup diharapkan dapat bertumbuh tanpa memedulikan lokasi geografis. Ini jugalah yang membedakan startup dengan usaha kecil. Salah satu hal yang masih membingungkan bagi banyak orang adalah perbedaan antara startup dan UKM. Sebenarnya apa yang membedakan startup dengan bisnis kecil.

4.1.3 Perbedaan antara Startup dan UKM

Ada beberapa perbedaan antara dua jenis bisnis dan beberapa perbedaan penting. Ketika kita mendengar kata startup, hal pertama yang -biasa muncul adalah perusahaan – perusahaan teknologi Silicon Valley yang memimpin inovasi. Ketika kita memikirkan usaha kecil, mungkin yang terbesit pertama kali adalah toko-toko kecil di kota yang dikelola oleh sebuah keluarga. Kenyataannya adalah kebanyakan bisnis tidak sesuai dengan stereotip ini, namun ada di antara keduanya. Begini cara membedakan antara startup dan usaha kecil.

- Pendanaan Bisnis

Kedua jenis usaha ini bisa dibedakan dengan bagaimana mereka dibiayai. Startup biasanya merupakan sebuah perusahaan yang didukung dengan dana dari investor. Mendapatkan dana untuk startup tidaklah mudah karena tingginya persaingan di dunia venture capitals. Anda perlu membuat pitch yang dapat menarik perhatian perusahaan venture capitals.

Metrik pertumbuhan yang jelas adalah bagian besar dari mengamankan dana untuk startups. Sementara itu, UKM mendapatkan dana mereka dengan cara berbeda dari pada startups. Daripada beralih ke perusahaan venture capital, UKM bergantung pada pinjaman dari bank, teman, dan keluarga untuk mendanai bisnis mereka di lapangan. Karena usaha kecil biasanya tidak perlu merencanakan peningkatan dengan cara yang sama, tambahan putaran dana (series A, series B, dll) tidak diperlukan.

- **Pertumbuhan Bisnis**

Pertumbuhan bisnis startup dan UKM juga merupakan salah satu perbedaan antara dua jenis usaha ini. Seperti yang sudah disebutkan di atas pertumbuhan adalah salah satu karakteristik startup. Startup didesain untuk mengalami pertumbuhan yang cepat. Tidak seperti UKM yang biasanya tidak berpartisipasi dalam putaran tambahan dana atau investasi, startup harus mendapatkan investor dan pendanaan untuk setiap tahap pertumbuhan yang ingin mereka capai. Kebanyakan startups mulai melayani hanya sebagian kecil dari pasaran baru kemudian mengembangkan bisnis mereka sepanjang jalan. Sementara itu, UKM juga fokus pada pertumbuhan tetapi tidak sampai seperti startup. UKM dibangun dengan prinsip untuk menghasilkan pendapatan (revenue) sebesar mungkin dari awal sambil mempertahankan pengeluaran serendah mungkin. Tidak seperti startup yang sering mengeluarkan produk atau layanan bertahap sepanjang perjalanan, UKM mungkin mulai menawarkan seluruh menu layanan atau produk mereka dari awal. Model bisnis tradisional mendorong bisnis kecil, sementara model yang berfokus pada pertumbuhan mendorong startup.

- **Risiko Bisnis**

Tentu saja tidak ada bisnis yang tidak memiliki risiko. Begitu juga dengan startup dan UKM. Tetapi, keduanya memiliki risiko yang berbeda. Startup biasanya dimulai dengan keinginan pendirinya untuk menemukan layanan, produk, atau platform yang dapat menarik audience dan menghasilkan keuntungan. Membangun produk atau layanan dari nol

membutuhkan waktu, investasi yang besar, dan banyaknya fokus dan konsentrasi. Terkadang, bahkan setelah semua masukan itu, semuanya tidak berjalan dengan lancar. Itulah mengapa startup jauh lebih berisiko daripada UKM dalam jangka panjang. UKM juga memiliki risiko tetapi yang membuat bisnis mereka memiliki risiko yang lebih kecil dari startup adalah pendiri sebuah UKM biasanya memiliki model bisnis yang sudah terbukti bekerja. Selain itu, karena usaha kecil tidak fokus pada pertumbuhan, mereka tidak memiliki risiko pertumbuhan yang terlalu cepat.

4.1.4 Unicorn Startups

Unicorn di dunia startup adalah perusahaan startup yang memiliki value lebih dari US\$1 miliar . Istilah ini pertama kali digunakan oleh venture capitalist, Aileen Lee, dimana dia memilih kuda bertanduk satu ini untuk mewakili kelangkaan statistik dari usaha-usaha startup. Decacorn adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perusahaan-perusahaan startup yang memiliki value lebih dari US\$10 miliar. Selain itu, hectocorn adalah perusahaan startup yang memiliki value lebih dari US\$ 100 miliar. Menurut TechCrunch , sampai saat ini sudah ada 267 perusahaan startup yang bisa dianggap sebagai Unicorn.

Gambar 4.1

5 perusahaan startup dengan value tertinggi di dunia saat ini



Sumber : (<https://www.dewaweb.com/blog/startup-indonesia/>)

Dari gambar 5 perusahaan startup dengan value tertinggi didunia saat ini:

1. Uber

Didirikan pada bulan Maret 2009, startup jasa transportasi ini mencapai status Unicorn pada bulan Agustus 2013 dengan investasi Series C senilai US\$258 juta yang memberi nilai perusahaan pada US\$3,72 miliar. Lebih dari setahun kemudian, Uber memiliki value sebesar US \$18 miliar. Di tahun 2016, Uber mendapat pendanaan tambahan, termasuk US\$3,5 miliar investasi dari Saudi Arabia dan US\$2 miliar dari leveraged loan. Selain itu, Uber juga mendapat investasi dari Didi Chuxing, perusahaan startup di China, sebesar US\$1 miliar di Uber Global dan akuisisi Uber China sebesar US\$35 miliar. Saat ini Uber memiliki value sebesar US\$62 miliar.

2. ANT Financial

ANT Financial adalah sebuah fintech yang merupakan affiliate dari Alibaba Group. Mereka menjalankan Alipay, sebuah aplikasi pembayaran online. Saat ini mereka memiliki value sebesar US\$60 miliar.

3. Didi Chuxing

Didi Chuxing adalah sebuah jasa transportasi layaknya Uber dari Cina. Ini juga adalah perusahaan yang berinvestasi di Uber Global dan mengakuisisi Uber Cina. Pada Januari 2016, startup ini mendapat investasi sebesar US\$3 miliar dan nilai sebesar US\$16 miliar. Saat ini Didi Chuxing memiliki nilai sebesar US\$50 miliar.

4. Xiaomi

Anda pasti tidak asing dengan merek handphone Xiaomi. Saat ini, Xiaomi memiliki value sebesar US\$45 miliar. Xiaomi pertama kali didirikan pada April 2010 oleh delapan orang partners dan menjadi Unicorn di bulan Desember 2011.

5. AirBnB

AirBnB adalah unicorn terbesar kedua di US. Didirikan pada Agustus 2008, Airbnb menjadi Unicorn pada bulan Juli 2011 dengan valuasi sebesar US\$1,3 miliar. Pada bulan lalu, lebih dari 60 juta orang telah menggunakan layanan penyewaan kamar Airbnb, yang beroperasi di 34.000 kota di 190 negara.

4.1.5 Contoh-contoh Startup Sukses di Indonesia

Memang tidak semua startup berhasil mengembangkan dirinya menjadi suatu bisnis yang sukses. Banyak juga startup yang gagal walau dana untuk memulainya dapat dikatakan cukup. Dibutuhkan tidak hanya ide bisnis brilian dan kucuran dana fantastis dari pemodal besar, tetapi juga teamwork yang produktif untuk membangun startup . Berikut adalah beberapa contoh startup yang berhasil di Indonesia:

1. Traveloka

Traveloka merupakan startup yang sempat disebut-sebut sebagai Unicorn Indonesia. Ferry Unardi, pendirinya adalah lulusan MBA dari Harvard Business School. Setelah lulus ia memiliki ide soal pembuatan aplikasi pemesanan tiket penerbangan yang akhirnya direalisasikan pada tahun 2012 di Indonesia. Ia kemudian berhasil menerima dana dari East Ventures dan terus mengembangkan bisnis ini hingga kurang dari setahun ia mengambil kembali putaran seri A pada bulan September 2013 dari Global Founders Capital. Lalu, pada bulan Desembernya di tahun yang sama Ferry Unardi melaporkan bahwa Traveloka berhasil memproses dua juta pencarian tiket penerbangan.

2. Tokopedia

Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya bersama Leontinus Alpha Edison pada tahun 2009. Aplikasi dan website belanja online satu ini dapat dikatakan sukses besar sejauh ini karena adanya pendanaan yang sangat besar dari berbagai investor besar. Bahkan, sempat disebut-sebut sebagai startup dengan rekor pendanaan terbesar dalam sejarah startup teknologi di Indonesia. Sebenarnya sebelum benar-benar didirikan pada 2009, dari dua tahun sebelumnya, William Tanuwijaya telah melakukan booting usahanya terlebih dahulu. Lalu, pada bulan Maret 2010, Tokopedia berhasil mendapat ronde seri A dari East Ventures, diikuti dengan investasi seri B senilai US\$700,000 dari CyberAgent Ventures pada bulan April 2011. Satu tahun kemudian, Tokopedia kembali mendapat dana dari investor lain yaitu Netprice (namanya kini Beenos) yang membantu Tokopedia untuk memfasilitasi 13,4 juta penjualan dalam periode 12 bulan. Tak sampai di situ, pada bulan Juni 2013, ada investor lain yang turut tertarik dan mendanai hingga Oktober 2016 SoftBank dan Sequoia Capital memberikan US\$100 juta

3. Go-Jek

Go-Jek digagas oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. GoJek merupakan aplikasi online yang memudahkan pengguna dalam memesan jasa transportasi. Kini Go-Jek App telah menyediakan berbagai jasa lain. Jasa jasa tersebut seperti jasa pengiriman makanan, pengiriman barang, pembelian pulsa, pembelian tiket, dan banyak lainnya. Hingga Agustus 2016, Go-Jek telah berhasil menggalang dana sebesar US\$550 juta hingga akhirnya startup ini resmi menjadi Unicorn senilai US\$1,3 Miliar . Go-Jek hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun mulai dari peluncuran aplikasi hingga mendapat gelar Unicorn tersebut. Selama beberapa tahun pertama, memang Go-Jek tidak begitu menarik investor, namun nasibnya jadi baik setelah meluncurkan aplikasi pada 2015. Sejak itu, supir Go-Jek ada di mana-mana dengan jaket dan helm hijaunya, di seluruh kota besar di Indonesia.

4. Bukalapak

Bukalapak adalah startup pesaing online shop app sejenis khususnya Tokopedia (yang sempat kami bahas sebelumnya). Memang Bukalapak tidak memiliki dana sebesar Tokopedia, namun pendanaan yang didapatkan cenderung konsisten dengan hasil penjualan yang juga konsisten. Beberapa investor termasuk investor dari Jepang telah berinvestasi bagi Bukalapak. Bukalapak memulai operasinya pada tahun 2011. Hingga pada bulan Februari 2015, berhasil meraih ronde seri B dengan jumlah yang tidak dipublikasikan oleh Emtek Group. Pada bulan September 2012, Bukalapak berhasil meraih ronde seri A dari Gree Ventures setelah menambahkan fitur baru di app-nya yaitu Clickpay dari Bank Mandiri. Kemudian pada bulan Februari 2014, mendapat pula dan dari Aucfan, IREP, 500 Startups dan kembali didanai lagi oleh Gree Ventures.

5. KitaBisa

Kitabisa didirikan pada tahun 2013. Kitabisa ini merupakan wadah dan teknologi online bagi individu, komunitas, organisasi, maupun perusahaan yang ingin menggalang dana dengan membuat halaman donasi online untuk beragam tujuan sosial, personal, kreatif dan lain-lain. User atau visitor di website kitabisa.com dapat berdonasi kapan saja secara online bagi kampanye-kampanye yang ada berdasarkan hasil pencarian kategori atau organisasi yang diminati atau dipedulikan. Sebagai social enterprise startup, Kitabisa mengenakan tarif administrasi sebesar 5% dari total donasi di sebuah campaign, kecuali campaign bencana alam dan zakat (0% biaya administrasi). Para donator besar bagi pengembangan startup ini adalah 500 Startups, 500 Accelerators, dan GEPI. Hingga 2016 akhir tahun lalu saja, Kitabisa telah mengumpulkan 60 miliar Rupiah donasi publik dari sekitar 3.000 kampanye sosial.

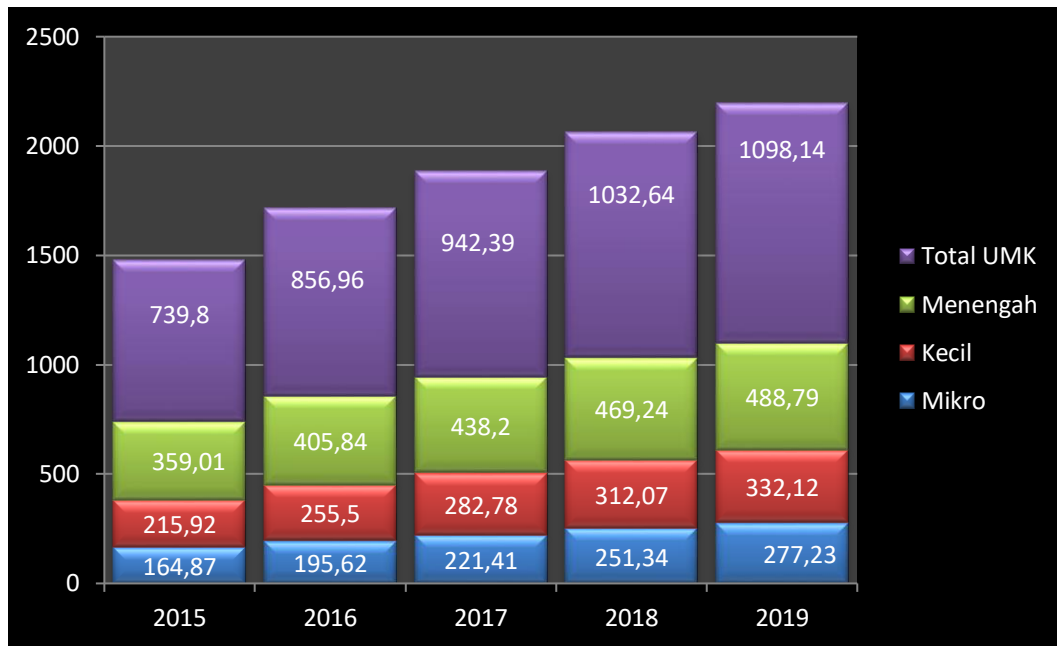
4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Perkembangan UMKM di Indonesia

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta . Departemen Koperasi dan UMKM. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, UMKM memiliki peranan baru yang lebih penting lagi yaitu sebagai salah satu faktor utama pendorong perkembangan dan pertumbuhan ekspor non-migas dan sebagai industri pendukung yang membuat komponene-komponen dan spare parts untuk Usaha besar (UB) lewat keterkaitan produksi misalnya dalam bentuk subcontracting. Bukan hanya Usaha Besar saja, tetapi UMKM juga bisa berperan penting dalam pertumbuhan ekspor dan bisa bersaing di pasar domestik terhadap barang-barang impor maupun di pasar global. Di Indonesia, UMKM sangat diharapkan dapat menjadi salah satu pemain penting dalam penciptaan pasar baru bagi Indonesia tidak hanya di dalam negeri tetapi lebih penting lagi di luar negeri, jadi salah satu sumber penting bagi surplus neraca perdagangan dan jasa atau neraca pembayaran.

Gambar 4-2

Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia 2015-2019



Sumber: BPS (www.bps.go.id) dan diolah

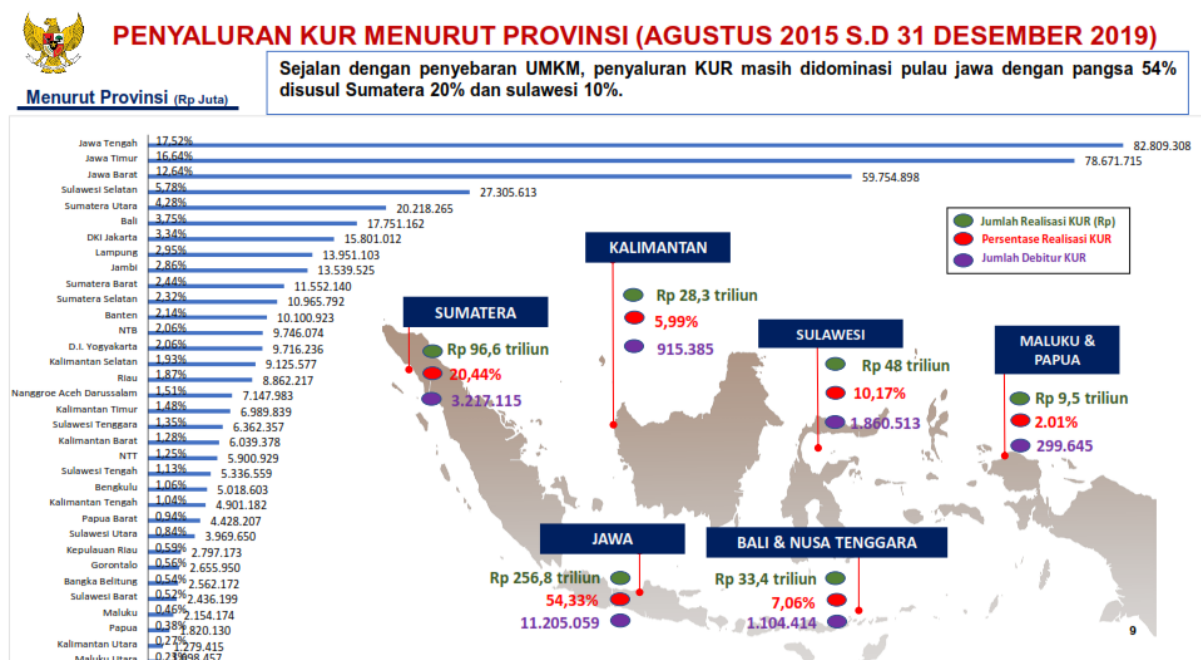
Dari Gambar 4-2 diatas Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia mulai dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif yang cukup tinggi di setiap tahunnya, pada Tahun 2015 usaha mikro di Indonesia 164,87 %, usaha kecil sebesar 215,92 % dan menengah sebesar 359,01% dengan Total UMK sebesar 739,8%, Pada tahun 2016 usaha mikro di Indonesia 195,62%, usaha kecil sebesar 255,5% dan menengah sebesar 405,84% dengan Total UMK sebesar 856,96%, Pada Tahun 2017 usaha mikro di Indonesia 221,41%, usaha kecil sebesar 282,78% dan menengah sebesar 438,2% dengan Total UMK sebesar 942,39%, Pada tahun 2018 usaha mikro di Indonesia 251,34%, usaha kecil sebesar 312,07% dan menengah sebesar 469,42% dengan Total UMK sebesar 1032,64%, Pada Tahun 2019 usaha mikro di Indonesia 277,23%, usaha kecil sebesar 332,12% dan menengah sebesar 488,79 % dengan Total UMK sebesar 1098,14%, mulai tahun 2015-2019 Usaha mikro kecil menengah mengalami peningkatan.

4.2.2 Perkembangan KUR di Indonesia

Upaya perluasan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dan peningkatan inklusi keuangan difasilitasi pemerintah dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan dasar Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan skema Kredit/Pembiayaan bersubsidi bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang usahanya layak (feasible), namun ketiadaan agunan yang sesuai persyaratan perbankan (unbankable). Pada awal pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tanggal 9 Oktober 2007 menjelaskan bank pelaksana KUR adalah Bank BUMN yakni sebanyak 6 Bank (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). Sampai dengan tahun 2018 menunjukkan jumlah lembaga penyalur KUR terdiri 41 lembaga (14 Bank Umum, 20 Bank Pemerintah Daerah, 5 Lembaga Keuangan Non Bank, 2 Koperasi Simpan Pinjam) peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2007. Keterlibatan Bank Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat, tidak terlepas dari fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dengan tugas pokok pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan daerah. Disamping itu, Bank Pembangunan Daerah memiliki tugas pokok tambahan dijelaskan pada pasal 3 dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah yakni : (a) pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat; (b) Pemegang Kas Daerah dan atau menyimpan uang daerah; dan (c) salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan memperhatikan tugas pokoknya, menunjukkan Bank Pemerintah Daerah memiliki posisi strategis dalam mendorong kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan daerah

Selain itu, Bank Pemerintah Daerah dikatakan memiliki keunggulan komparatif dilihat dari aspek lokasi, sehingga lebih memahami dan menguasai peta bisnis di wilayah operasionalnya. Dengan keunggulan komparatif tersebut diharapkan, mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor ekonomi yang produktif.

Gambar 4-3
Penyaluran KUR Per-Provinsi di Indonesia
2015-2019



Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Dari gambar 4- Selama tahun 2015-2019, pergerakan Kredit Usaha Rakyat di 34 Provinsi di Indonesia berfluktuatif di setiap provinsi nya, dari 34 provinsi terdapat 5 Provinsi yang penyaluran KUR nya mengalami nilai yang tinggi seperti pada Provinsi Jawa tengah mendapatkan nilai sebesar 17,52 % dan disusul di provinsi jawa timur dengan nilai sebesar 16,64 % setelah itu pada provinsi jawa barat memiliki nilai penyaluran KUR sebesar 12,64% kemudian pada posisi keempat provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 5,78 % kemudian

untuk Provinsi yang memiliki nilai penyaluran KUR tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara dengan nilai sebesar 4,28% berikut adalah provinsi-provinsi yang memiliki nilai tertinggi di Indonesia, Untuk Penyaluran KUR terendah pada tahun 2015-2019 adalah Maluku Utara dengan nilai sebesar 0,23 % dan untuk provinsi kedua terendah adalah Kalimantan Utara dengan nilai sebesar 0,27 % setelah itu provinsi Papua dengan nilai sebesar 0,38% .

Potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pulau Jawa, dengan jumlah signifikan menjadi peluang pasar bagi penyaluran KUR bagi Bank Pembangunan Daerah. Namun potensi pasar usaha mikro, kecil dan menengah tersebut diimbangi dengan potensi tingginya risiko yang dihadapi Bank Pemerintah Daerah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat yakni kredit bermasalah. Kredit bermasalah dimaknai kredit yang tidak mampu diselesaikan oleh debitur terhadap kreditur sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama

Risiko kredit bermasalah pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia, tidak terlepas dari kompleksitas permasalahan yang dihadapinya dalam mengatasi kesulitan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah . Dalam penyaluran KUR sumber dana yang digunakan 100% (seratus persen) bersumber dari dana Bank Pelaksana, maka perbankan dituntut prudent dalam proses penyalurannya. Pengelolaan dana yang prudent dan baik akan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien, yang dinilai dengan pendekatan analisis rasio keuangan terdiri Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk permodalan, Non Performing Loans (NPL) untuk kualitas asset, Net Profit Margin (NPM) untuk kinerja manajemen, Return on Assets (ROA) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) untuk rentabilitas, serta Loan to Deposit Ratio (LDR) untuk likuiditas.

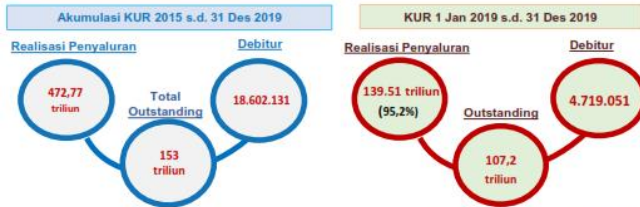
Gambar 4-4
Realisasi Penyaluran KUR di Indonesia
2015-2019



REALISASI PENYALURAN KUR

Realisasi Penyaluran KUR Posisi 31 Desember 2019*

Total Realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp 472,77 T dengan *outstanding* Rp 153 T, dan NPL 1,10%. Penyaluran KUR tahun 2019, sampai dengan 31 Desember 2019 sudah mencapai Rp 139,51 T (99,65% dari target tahun 2019 sebesar Rp140 T).



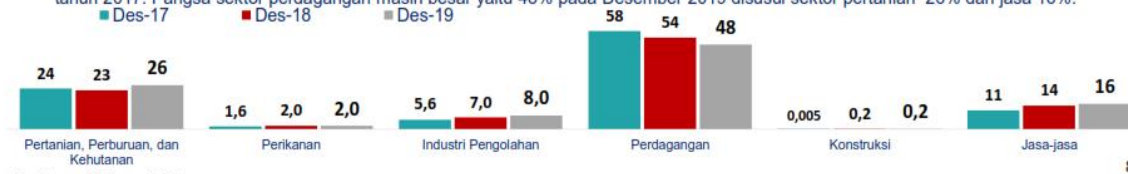
Realisasi Penyaluran KUR Sektor Produksi Posisi 31 Desember 2019

Porsi penyaluran KUR sektor produksi (non perdagangan) sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 51,52% (masih dibawah target sektor produksi tahun 2019 yaitu minimal 60%).



Realisasi Penyaluran KUR Sektor Ekonomi Posisi 31 Desember 2019 (dalam %)

KUR di sektor perdagangan (non produksi) mulai menurun dan KUR di sektor produksi mulai meningkat sejak diberlakukannya target produksi sejak tahun 2017. Pangsa sektor perdagangan masih besar yaitu 48% pada Desember 2019 disusul sektor pertanian 26% dan jasa 16%.



*update per 21 Januari 2020

8

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Dari Gambar 4-4 di atas bahwa Realisasi Penyaluran KUR di Indonesia pada sektor Ekonomi di bidang perikanan sebesar 2,0 % dan di bidang Industri Pengolahan sebesar 8,0 %, Namun di sektor perdagangan Realisasi Penyaluran Kur mengalami peningkatan sebesar 48% sektor perdagangan merupakan sektor yang paling Unggul disusul sektor Pertanian 26 % dan sektor jasa sebesar 16% sementara sektor yang paling rendah nilainya adalah sektor Konstruksi dengan nilai sebesar 0,2%.

Data penyaluran telah menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil di Indonesia sehingga Perekonomian Indonesia mengalami peningkatan, dan Kesejahteraan Masyarakat pun meningkat . Sehingga secara langsung ataupun tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini.
2. Perkembangan teknologi digital akan memudahkan para pelaku bisnis terutama pelaku UMKM yaitu dapat menekan biaya promosi dan biaya pemasaran sampai ke luar negeri. Peningkatan PDB di Indonesia sebesar 56% merupakan kontribusi dari UMKM .
3. Memang tidak semua startup berhasil mengembangkan dirinya menjadi suatu bisnis yang sukses. Beberapa teamwork yang produktif untuk membangun startup seperti Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, Kitabisa, Gojek.
4. Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia mulai dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif yang cukup tinggi di setiap tahunnya, pada Tahun 2015 usaha mikro di Indonesia 164,87 %, usaha kecil sebesar 215,92 % dan menengah sebesar 359,01% dengan Total UMK sebesar 739,8%,
5. Potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pulau Jawa, dengan jumlah signifikan menjadi peluang pasar bagi penyaluran KUR bagi Bank Pembangunan Daerah. Namun potensi pasar usaha mikro, kecil dan menengah tersebut diimbangi dengan potensi

tingginya risiko yang dihadapi Bank Pemerintah Daerah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat yakni kredit bermasalah.

5.2 Saran

1. Usaha Mikro Kecil Menengah tidak satu-satunya variabel ataupun sektor yang mendukung pembangunan nasional, tetapi apabila Usaha Mikro Kecil Menengah berada dalam keadaan tingkat yang tinggi maka akan memberikan dampak yang positif juga pada pembangunan nasional. Pemerintah harus menstabilkan Usaha-Usaha Kecil menengah di Indonesia agar dapat menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2. Di Indonesia, UMKM sangat diharapkan dapat menjadi salah satu pemain penting dalam penciptaan pasar baru bagi Indonesia tidak hanya di dalam negeri tetapi lebih penting lagi di luar negeri, jadi salah satu sumber penting bagi surplus neraca perdagangan dan jasa atau neraca pembayaran.
3. Apabila jumlah UMKM di Indonesia memiliki kemajuan yang besar berarti tingkat kualitas sumber daya masyarakat yang besar pula. Sehingga dengan tingkat kualitas masyarakat yang besar maka secara langsung ataupun tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi. sehingga diperlukannya kebijakan agar kualitas sumber daya manusia di Indonesia meningkat

DAFTAR PUSTAKA

- Lila, V.Wiratna Sujarweni, (2015). *Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM*
- Dewi, Syahrir Hakim Nasution, (2013). *Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan*
- Yuli Rahmini Suci, (2017). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Di Indonesia*
- Badan Pusat Statistik (2019). *Statistik Keternagakerjaan Indonesia 2019*. www.bps.go.id
- Tulus Tambunan, (2002). *Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia : Beberapa Isu Penting UKM Di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- Setiawan, (2011). *Pengaruh Return on Assets (Roa), Debt To Equity Ratio (Der), Dan Price To Book Value (Pbv) Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Di Bei Periode 2007 – 2009*
- Partomo, (2004). *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, Galia Indonesia, Bogor.
- Imaduddin Abullah (2015). “*Sekitar 50 Persen Dari Total Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kekurangan Modal*”. <https://www.jurnalasia.com/>. Diakses 24 Maret 2015.
- Jaya, Tiara Juliana (2018). *Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Nilai Produksi Usaha Mikro Di Kota Metro*. Tesis S2, Kota Metro, Bandar Lampung.
- Juniarti, Evi (2016). *Analisis Peran Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pengembangan UMKM Di Kota Bandung*
- Mangkoesoebroto, Guritno (1994). *Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Boediono (1999). *Teori Pertumbuhan ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.

Bastian, Indra (2010). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Ari Sudarman (1999). *Teori Ekonomi Mikro*. Jilid I. Yogyakarta: BPFE UGM.

Sadono, Sukirno (1994). *Pengantar Ekonomi Makro*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 146/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/22/1/2020

Kepada Yth.

Medan, 22/1/2020

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Emir Akbar Paiss
NPM : 1605180024
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah

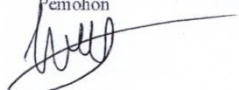
Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Kebijakan KUR bagi UMKM
Rencana Judul : Analisis potensi dan evaluasi kebijakan KUR bagi UMKM di Kota Medan
2. Analisis pengaruh influencer terhadap tingkat pembelian gaya hidup masyarakat kota medan
3. Peranan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia

Objek/Lokasi Penelitian : Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Emir Akbar Paiss)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 146/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/22/1/2020

Nama Mahasiswa : Emir Akbar Paiss
NPM : 1605180024
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah
Tanggal Pengajuan Judul : 22/1/2020
Nama Dosen pembimbing^{*)} : *Dr. Pramiya Hariani M.S.*
Judul^{**)} :

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Pramiya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan,
Dosen Pembimbing
(.....)

Keterangan:
*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Ditisi oleh Dosen Pembimbing
Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2450 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2020

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Pada Tanggal : **20 Mei 2020**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Emir Akbar Paiss**
N P M : **1605180024**
Semester : **VIII (Delapan)**
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Evaluasi Dan Perkembangan Kebijakan Kredit Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia**

Dosen Pembimbing : **Dr.Prawidya Hariani RS.,SE.,M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 26 Agustus 2021**
4. Revisi Judul.....

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : **Medan**
Pada Tanggal : **07 Muharram 1442 H**
26 Agustus 2020 M



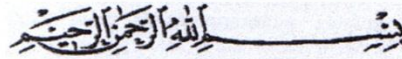
Dekan

H. JANURI, SE.,MM.,M.Si.

Tembusan :
1. Pertinggal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



BERITA ACARA BIMBINGAN SEMINAR PROPOSAL

UNIV / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA PRODI : Dr PRAWIDYA HARIANI S.E, M.Si.
PEMBIMBING SEMPRO : Dr PRAWIDYA HARIANI S.E, M.Si.

NAMA MAHASISWA : EMIR AKBAR PAISS
NPM : 1605180024
KONSENTRASI : PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
30 / '20 / 01	Bab I lakukan revisi sesuai dan struktur yg diarahkan pula rumus mshk dan Tugas Penelitian.		
19 / '20 / 02	Bab II, sesuaikan dgn gedul, Grand Theory hrs paha: Text book, tugas.		
31 / '20 / 03	Bab III, Mubpar hrs di sesuaikan dgn Buku paket dan Pis dgn Tugas Penelitian.		
05 / '20 / 05	ACC ul di Semula Ppse		

Pembimbing Seminar Proposal

Dr. PRAWIDYA HARIANI S.E, M.Si

Medan, 05 Mei 2020
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Ekonomi
Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI S.E, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Pada hari ini Rabu, 20 Mei 2020 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan menerangkan bahwa :

Nama : Emir Akbar Paiss
N.P.M. : 1605180024
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 29 Juli 1998
Alamat Rumah : Jalan Pukesmas Gg Puskemas No.13 Medan Sunggal
JudulProposal : ANALISIS EVALUASI DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI INDONESIA

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	-
Bab I	Memperbaiki Rumusan masalah.
Bab II	-
Bab III	Menambah penjelasan Analisis Metode penelitian.
Lainnya	-
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Rabu, 20 Mei 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani Rs, SE., M.Si.

Pembimbing

Dr. Prawidya Hariani Rs, SE., M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembanding

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 20 Mei 2020** menerangkan bahwa:

Nama : Emir Akbar Paiss
N .P.M. : 1605180024
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 29 Juli 1998
Alamat Rumah : Jalan Pukesmas Gg Puskemas No.13 Medan Sunggal
JudulProposal : ANALISIS EVALUASI DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI INDONESIA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *Dr. Prawidya Hariani Rs, SE., M.Si.*

Medan, Rabu, 20 Mei 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani Rs, SE., M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Dr. Prawidya Hariani Rs, SE., M.Si.

Pembanding

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si

Diketahui / Disetujui

A.n. Dekan
Wakil Dekan -

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
 PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
 JENJANG : STRATA SATU (S-1)
 KETUA PRODI : Dr PRAWIDYA HARIANI S.E, M.Si.
 PEMBIMBING SEMPRO : Dr PRAWIDYA HARIANI S.E, M.Si.
 NAMA MAHASISWA : EMIR AKBAR PAISS
 NPM : 1605180024
 KONSENTRASI : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
	Pengantar awal di Bab IV harus lebih lengkap data yg UTKM + Start Up bisnis yg sdg berkembang dan sirupan dari Cap. Kaya di Indonesia.	
	Tambahkan Data yg menambah analisis lebih mendalam yg meliputi tujuan dr Masalah 1 dan 2 yg ada di Bab I	
	Tambahkan data Kebijakan Stimulasi Perace Ekonomi di Era Pandemi Cov-19.	
30/7-2020	ACC yg di sidang Revisi Hrga. !!	

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Medan,2020
 Diketahui / Disetujui

Pembimbing Seminar Proposal

Ketua Program Studi Ekonomi

Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI S.E, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI S.E, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Emir Akbar Paiss

NPM : 1605180024

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Pembangunan Daerah

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **“Analisis Evaluasi dan Perkembangan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



EMIR AKBAR PAISS